

### **BAB III**

## **SIKAP PEMERINTAH THAILAND TERHADAP ISLAM DAN DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM DI THAILAND**

Kerajaan Siam, atau yang dikenal dengan nama tradisional Muaeng Thai, mengalami perubahan besar pada tahun 1939 dengan menjadi sebuah negara berbentuk monarki konstitusional bernama Thailand. Bentuk baru *nation-state* ini kemudian memunculkan konsekuensi konsekuensi kebijakan yang terus diperbarui.

#### **A. Kebijakan pemerintah terhadap islam di thailand**

Kebijakan kebijakan pemerintah Thailand untuk menyatukan seluruh etnis yang ada di Thailand dengan kebijakan satu Bangsa Thailand, satu Bahasa Thailand, dan satu Budaya Budha telah dimulai sejak negara Thailand modern terbentuk. Begitu juga dengan dinamika kebijakan yang mengatur Islam di

Thailand secara khusus. Pemerintah Thailand menyadari bahwa penting untuk mempunyai pengaturan secara khusus tentang Islam, karena Islam di Thailand dapat menjadi potensi untuk memajukan Thailand.

### **1. Kebijakan Pemerintahan Thailand Modern**

Kelompok bahasa dan budaya yang berbeda di Thailand telah ada bahkan jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa yang ada saat ini. Di Thailand, sekolah menjadi alat penting bagi pembentukan negara-bangsa dalam rangka negosiasi batas-batas kerajaan. Pemerintah Thailand menerapkan pendidikan wajib nasional sebagai salah satu bentuk kebijakan integrasi. Masyarakat dataran tinggi dan etnis minoritas tidak diijinkan untuk terlibat dalam proses identifikasi dan penentuan nasib sendiri. Sistem pendidikan wajib nasional yang diterapkan pemerintah pusat Thailand hanya menyisakan sedikit ruang untuk menghargai dan merayakan praktik budaya, bahasa, dan identitas non-Thailand. Pemuda masyarakat dataran tinggi dan etnis minoritas merasakan dampak jangka panjang dari inisiatif gerakan membawa pemuda-

pemuda tersebut ke sekolah-sekolah dataran rendah dengan hilangnya budaya dan bahasa mereka sendiri. Padahal masyarakat adat dan etns minoritas telah menyiapkan sistem pembelajaran untuk membentuk dunia mereka sendiri (Leepreecha & Meixi, 2018).

Di Thailand Umat Islam dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Muslim Melayu yang menetap di Thailand bagian selatan dan berasal dari Malaysia yang menyebut, dan Muslim non-Melayu yang berasal dari Thailand, Pakistan, India, Cina, dan tempat tempat lain yang mendiami wilayah lain selain Thailand bagian selatan. Pemerintah Thailand bermaksud mengintegrasikan semua Muslim Thailand ke "Islam Thailand" tetapi Muslim di bagian Selatan Thailand lebih suka menyebut diri mereka sebagai Muslim Melayu sesuai dengan latar belakang sejarah dan politik mereka. Istilah Islam Thailand diciptakan oleh pemerintah Thailand pada sekitar 1940-an, namun hanya digunakan oleh birokrat pemerintah, media, dan akademisi. Istilah digunakan untuk mewakili Muslim di Thailand yang terasimilasi.

Hukum Islam di perundangan Thailand pertama kali muncul dalam Keputusan 1901. Pada bagian 32 dalam keputusan ini menyatakan bahwa hukum Islam akan diterapkan dalam persidangan dan adjudikasi perselisihan siil yang sesuai dengan hukum Islam dimana pengungat dan tergugat beragama islam, dan To Kali (Kadi) yang ahli dan menganut agama Islam akan menjadi orang yang memutuskan perkara berdasar hukum Islam. Kata 'Kali'' berasal dari kata Kadi yang berarti hakim atau alim. Pengucapan istilah Kadi dalam bahasa Arab dan ditransmisikan ke dalam bahasa Thailand (Shinya, 2017).

Dibawah Kementrian Kehakiman yang didirikan pada tahun 1981, pengadilan tradisionall diubah menjadi pengadilan di bawah kehakiman. Hukum konstitusional adalah dimensi lain dari modernisasi hukum yang mempengaruhi pembentukan implementasi hukum Islam di Thailand. Melalui "Revolusi Konstitusi pada bulan Juni 1932, Thailand mengalami perubahan sistem politik dari Monarki Absolut menjadi Monarki kosntitusional. Hal ini membuat para perancang hukum harus menyelaraskan peran Raja tradisional, yaitu membuat Budisme

menjadi makmur, dengan konsep moderen tentang kebebasan beragama (Ishii, 1994; Shinya, 2017).

Konstitusi 1932 yang diundangkan pada Desember 1932 menyatakan bahwa Raja akan menjadi seorang pelindung Budha, dan akan menjadi seorang *Sasanupathamphok* (pendukung agama tertinggi). Menurut Ishii (1994), sebenarnya gelar *Sasanupathamphok* hanya berlaku untuk agama Budha saja, namun para Penulis Konstitusi 1932 mencoba mendamaikan peran tradisional Raja sebagai pelindung Budhisme dan konsep moderen kebebasan beragama dengan memasukkan agama-agama lain yang ada di Thailand ke dalam konsep *Sasanupathamphok*, yang kemudian menjadi *Akkhasanupathamphok* yang berarti pelindung kerajaan agama suci.

Terdapat tujuh belas Konstitusi Thailand sepanjang tahun 1932 hingga tahun 2016. Namun semua konstitusi itu tetap mengikuti pola Konstitusi 1932 tentang jaminan perlindungan terhadap agama oleh Kerajaan. Terdapat dua bagian yang berkaitan dengan agama di dalam Bab yang membahas hak asasi manusia. Pertama, bagian 27 mengenai kesetaraan di hadapan

hukum yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi yang tidak adil atas dasar perbedaan asal, ras, bahasa, dan kepercayaan agama. Kedua, bagian 37 yang menyatakan jaminan terhadap pengakuan agama (Shinya, 2017).

Sepanjang pemerintahan Thailand moderen sejak 1932 hingga kini, terjadi dinamika perundangan hukum Islam dan sikap pemerintah terhadap umat Islam. Perdana Menteri Pibunsongkram yang memimpin Thailand pada 1937-1944 mendorong nasionalisme dan mencabut Bagian 4 dari Undang-Undang yang mengesahkan Hukum Perdata dan Komersial, yang merupakan dasar bagi penerapan hukum Islam di tahun 1943. Namun periode penolakan penerapan hukum Islam tidak berlangsung lama, dan berakhir saat Pibunsongkram mundur (Pitsuwan, 1989). Pasca 1945, pemerintah Thailand memberlakukan serangkaian statuta untuk membangun kembali hukum Islam di tanah Siam, yaitu Keputusan Kerajaan tentang perlindungan Muslim yang diundangkan tahun 1946, Aplikasi Hukum Islam di daerah khusus Pattani, Naratiwat, Yala, dan Satun (yang selanjutnya disebut

Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Islam) tahun 1946<sup>1</sup>, dan Aturan tentang Masjid (Shinya, 2017).

Selain Raja yang didaulat sebagai pengawal agama yang menjamin kebebasan beragama bagi rakyat Thailand, Dekrit Kerajaan juga menetapkan sebuah posisi yang bergelar *Chularachamontori*, yaitu seorang pemimpin Islam dan berfungsi sebagai penasihat masalah-masalah Islam bagi Raja. Selain itu, Dekrit Kerajaan juga membentuk Komisi Islam Pusat dan Komisi Islam Provinsi dan menunjuk para pemimpin Islam untuk organisasi ini. Legalisasi organisasi Islam tersebut sesuai dengan kerangka kerja model organisasi Budha, yaitu Sangha. Namun sistem ini tidak berfungsi dengan baik dalam Islam karena Islam tidak mengenal perbedaan kasta seperti Budha (Ishii, 1994; Shinya, 2017). Aturan pelebagaan Islam di satu sisi dapat membantu memperluas perlindungan hukum bagi umat Islam dan adanya pengakuan peran publik bagi para pemimpin Muslim,

---

<sup>1</sup>Pemerintah Thailand memberlakukan aturan khusus kepada provinsi-provinsi tersebut yang berada di Thailand bagian Selatan, dimana aturan tentang perkembangan Islam disana lebih ketat dibandingkan daerah atau provinsi lain. Hal itu dikarenakan isu separatist dimana keempat provinsi tersebut ingin melepaskan diri dan membentuk negara Fathoni Darussalam.

namun di sisi lain, akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol dan menangani masalah Islam dan umat Islam dengan lebih mudah (Pitsuwan, 1989; Shinya, 2017).

Undang-Undang penerapan hukum Islam menggunakan kodifikasi dikarenakan beberapa alasan. Pertama, isi hukum Islam berbeda di setiap daerah. Kedua, diperlukan melihat beberapa literatur untuk menentukan isi peraturan yang sesuai dengan kasus di daerah. Ketiga, banyak hakim Islam yang awalnya tidak bisa berbahasa Thailand, sehingga diperlukan penerjemah dalam proses pengadilan. Undang-undang tentang Masjid mengatur tentang sistem pendaftaran Masjid dan meminta persetujuan Komisi Islam Provinsi untuk menunjuk Imam (Pitsuwan, 1989; Shinya, 2017).

Pada 1947, Pibul kembali mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Pridi dan Cham yang menjabat sebagai *Churarachamontri* pada masa itu melarikan diri ke keluar negeri. Kemudian pada 1948, Keputusan Kerajaan tentang Perlindungan Islam diubah dan jabatan *Churarachamontri* diturunkan menjadi penasihat Departemen Urusan Agama. Pada Tahun 1957, setelah Sarit Tanarat mengambil alih kekuasaan menggantikan Pibul melalui

kudeta, kebijakan asimilasi terhadap Muslim diperkuat kembali, walaupun bukan menjadi agenda yang diprioritaskan saat itu. (Onozawa, 1987; Pitsuwan, 1982; Shinya, 2017)

Dibawah rezim otoriter tahun 1950-an hingga awal tahun 1980-an, tidak banyak perubahan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan wilayah Islam yang sebagian besar dilakukan pada tahun 1940-an. Pada 1981, Undang-Undang yang mengatur tentang Haji mulai diberlakukan untuk memberi kenyamanan bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah Haji, yang kemudian diamandemen pada tahun 1989 dan 2016 (Shinya, 2017).

Dua produk hukum pemerintah Thailand terkait Islam yaitu Undang-undang Masjid tahun 1947 dan Dekrit tentang Perindungan Islam 1945 (yang juga telah mengalami perubahan pada tahun 1947) digantikan oleh Undang-Undang tentang Administrasi Organisasi Islam tahun 1997, dimana hal ini merampingkan ketentuan tentang organisasi Islam. Sedangkan struktur dasar organisasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu *Chularachamontori* (sebagai pemimpin di pusat) yang dipilih oleh masyarakat Muslim dan diangkat oleh Raja dan bertugas sebagai

pimpinan tertinggi umat Islam di Thailand dan penasihat untuk Raja terkait permasalahan Islam, Komisi Islam Pusat, Komisi Islam Provinsi, dan Komis Masjid. Fungsi resolusi perselisihan secara resmi juga ditambahkan kepada Komisi Islam. Komisi Masjid Islam juga dibentuk untuk mengorganisir Masjid (Shinya, 2017). Komite komite ini hanya memiliki otoritas secara agama, dan belum mempunyai otoritas yang mengikat secara hukum, serta belum mempunyai kekuasaan untuk mengelola aturan dan hukum terkait keislaman secara personal.

Islam diberi ruang di Thailand, sehingga sektor bisnis Islam pun turut berkembang. Pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-Undang Bank Islam pada tahun 2002, dan diimplementasikan dengan memberikan layanan perbankan syariah, seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Bank Krungthai merupakan bank komersial milik negara yang mempunyai layanan tersebut dan ditetapkan sebagai bank pemerintah khusus (Shinya, 2017).



Gambar 3.1 Islamic Bank of Thailand

(<http://www.chiangmailocator.com/chiang-mai-banks-currency-exchange-offices-5146:islamic-bank-of-thailand-chang-klan-rd>)

## 2. The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)

Komite Islam Wilayah dibentuk oleh masyarakat lokal provinsi yang memiliki masjid tidak kurang dari tiga masjid dan akan ditetapkan secara resmi oleh Komite Islam Pusat Thailand dengan anggota antara 9 hingga 30 orang. Komite Islam Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (*The Ministry of Interior*). Komite bertanggung jawab terhadap para Imam yang merupakan pimpinan Komite Islam Masyid untuk bertindak sesuai aturan dan pertauran yang ditetapkan oleh Kementerian.

Anggota komite ini memiliki kekuatan untuk memberikan saran dan masukan kepada Gubernur tentang Islam, selain wewenang untuk mengeluarkan sertifikat pernikahan dan perceraian, serta menyelesaikan perselisihan antar umat Islam secara hukum Islam termasuk masalah warisan, saat diminta.

Komite Islam Pusat dipimpin oleh Syaikh Al Islam sebagai Presiden Komite. Setiap propinsi menunjuk satu orang sebagai perwakilan propinsinya untuk menjadi nominasi saat pemilihan Syaikh Al Islam. Calon yang telah menerima persetujuan dari semua Komite Islam Provinsi di seluruh negara akan diajukan kepada Raja untuk ditunjuk sebagai Syaikh Al Islam. Anggota lain dari Komite Sentral Islam kemudian dipilih oleh Syaikh Al Islam. Keanggotaan komite meliputi sepertiga dari jumlah seluruh anggota komite propinsi di seluruh negara. Wewenang dan tugas dari Syaikh Al Islam adalah: memberikan saran dan usulan mengenai urusan Islam kepada pemerintah; menunjuk sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk memberikan masukan tentang aturan Islam, mengumumkan hasil dari observasi

bulan untuk penentuan hari-hari besar Islam dan mengumumkan keputusan tentang aturan Islam yang baru<sup>2</sup>.

Komite-komite ini memiliki beberapa otoritas hukum, namun otoritas itu hanya berlaku untuk umat Islam yang tinggal di propinsi Pattani, Narathiwat, yala, dan Satun. Sedangkan komite di propinsi lain yang berada di Thailand bagian tengah dan utara tidak memiliki otoritas hukum tersebut karena umat Islam yang tinggal di Thailand bagian tengah dan utara tidak memiliki hak untuk menerapkan hukum pribadi Islam (*Islamic Personal Law*) seperti yang dimiliki khusus oleh umat Islam di propinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Staun sesuai dengan Undang-Undang Penerapan Hukum Islam di Propinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun yang diundangkan tahun 1946.

Salah satu fungsi komite ini adalah menerbitkan sertifikat untuk produk produk halal. Sejak diundangkannya Undang Undang Organisasi Agama Islam 1997, tugas sertifikasi halal dibebankan kepada Komite Islam Pusat Thailand, hingga tahun 2000. Sejak 2000-2006 Kantor Komite Islam Propinsi yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Kerajaan (The Royal Act), tahun 1997, sec-8

bertanggung jawab untuk urusan sertifikasi halal dengan menggunakan layanan dari Pusat Sains Halal dan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Chulalongkorn, dalam pemeriksaan produk, termasuk analisis.



Gambar 3.2 Logo Halal CICOT ([www.cicot.or.th](http://www.cicot.or.th))

Pada Tahun 2005, Pusat Sains Halal mengadakan perjanjian kerjasama teknis dengan Institut Standar Makanan Halal. Lembaga ini, meskipun tidak secara langsung bertanggung jawab atas produk halal, namun bertanggung jawab atas pekejaan akademik Departemen Urusan Halal Komite Islam Pusat Thailand<sup>3</sup>. Produk produk yang telah diuji dan lulus dalam tes kehalalan produk, akan mendapat penanda seperti pada gambar 3.2. Hal ini akan

---

<sup>3</sup> <http://www.halalscience.org/service/>

memudahkan masyarakat Muslim Thailand yang ingin membeli produk halal, dan juga memudahkan produsen dalam penjualan.



Gambar 3.3 Logo Halal CICOT untuk Restaurant  
([www.cicot.or.th](http://www.cicot.or.th))

Selain untuk produk, Sertifikat Halal juga dikeluarkan untuk restoran. Hal ini akan memudahkan umat Muslim maupun turis Muslim yang ingin berwisata kuliner di Thailand. Restoran – restora yang telah lulus dalam tes kehalalan oleh *Islamic Council* akan mendapat tanda seperti gambar 3.3. Hal ini mendukung program Wisata Halal yang sedang digalakkan oleh pemerintah beserta masyarakat Muslim di Thailand. Selain wilayah wilayah selatan Thailand yang penuh dengan pantai eksotis, program wisata halal pemerintah Thailand juga mempromosikan Chiang Mai sebagai salah satu destinasi yang bisa dipilih. Thailand bahkan mengikuti *The Word Halal Summit* tahun 2018 yang diwakili oleh

pengurus *Halal Standard Institute*. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi kebutuhan warga negaranya yang beragama Islam.

## **B. Dinamika kehidupan sosial masyarakat muslim di thailand bagian selatan (patani) dan thailand bagian utara (chiang mai)**

Potret dinamika kehidupan sosial masyarakat muslim di Thailand bagian selatan dapat dilihat melalui kehidupan sosial masyarakat Patani. Sedangkan sebagian besar masyarakat Muslim Hui tinggal di wilayah Chiang Mai yang dapat menjadi representasi dari potret kehidupan Muslim di Thailand bagian utara.

### **1. Penaklukan kerajaan siam atas kerajaan patani**

Sebagian besar populasi Muslim di Thailand berada di wilayah selatan, yaitu di propinsi Patani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla yang biasa disebut oleh orang Thailand sebagai "*The Four Provinces*". Keempat propinsi di wilayah selatan Thailand

tersebut kemudian menjadi suatu manifestasi dari identitas Melayu yang berada di Thailand (Suhrke, 1989). Patani merupakan kerajaan *semi-independent* Melayu bagian dari Kerajaan Siam dari Sukhothai dan Ayuthaya. Patani merupakan kerajaan melayu yang merdeka setelah Ayuthaya runtuh. Namun kemudian dipaksa bergabung ke dalam wilayah Thailand melalui perjanjian *Anglo-Siam Treaty* antara pihak kerajaan Inggris dan kerajaan Siam pada tahun 1909, pada masa kepemimpinan Raja Rama. Perjanjian ini menyatakan bahwa wilayah Patani bukan sebagai sebuah kerajaan Melayu lagi, tetapi merupakan wilayah kerajaan Siam (Pitsuwan, 1989; P. Rudolf Yuniarto, 2004).

Patani yang mempunyai kedudukan strategis secara geografis, membuatnya temasyur sebagai jalan perdagangan pada abad ke-14 dan 15. Jalur ini menghubungkan tanah Arab, India, dan benua China. Kemasyuran ini kemudian juga menarik banyaknya pedagang Eropa yang mulai ekspansi kolonialisasi di Asia. Negara-negara Eropa yang pernah berada di Patani antara lain Portugis pada 1517, Belanda pada 1602, dan terakhir adalah

Inggris, yang kesemuanya mereka datang untuk berdagang (Wyatt, 2003; P. Rudolf Yuniarto, 2004).

Islam pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Islam Cina, yang kemudian dilanjutkan oleh para pedagang Muslim dari Arab dan India. Patani menjadi kerajaan yang kaya dan mencapai zaman keemasan dikarenakan adanya hubungan perdagangan dan penyebaran Islam ini. Kekuatan ekonomi dan juga stabilitas politik yang baik membuat Patani disegani oleh negeri negeri di sekitarnya, seperti Kerajaan di Semenanjung Melayu Pahang dan Johor Baru, termasuk kerajaan Ayudya (Wyatt, 2003). Ketika Pattani tengah menjadi kerajaan berdaulat, dan dipimpin oleh Raja Sulaiman, Kerajaan Siam terus menerus berusaha menguasai Pattani dengan cara cara agresi namun selalu menemui kegagalan (Kusuma, 2016). Hubungan yang terjalin antar bangsa Patani dan bangsa kolega perdagangannya telah berhasil menyelamatkan Patani dari penjajahan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Siam, Inggris, dan Perancis (P. Rudolf Yuniarto, 2004).

Setelah tahun 1688, Patani mulai mengalami kemerosotan karena tidak dipimpin oleh raja yang cakap. Pada awal abad ke-17,

Patani mengalami ketidakstabilan politik dalam negeri dengan adanya perebutan kekuasaan. Hal ini berdampak juga pada kemerosotan perdagangan, dimana para kolega dagang mereka memindahkan pola perniagaan ke negeri lain seperti Malaka dan Singapura (Wyatt, 1967). Hal ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Siam, yang pada saat bersamaan tengah berperang melawan Burma, dimana Patani menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan. Siam akhirnya dapat menguasai Patani pada 1778. Kerajaan Siam memilihkan Raja yang pro dengan kerajaan Siam, yaitu raja raja dari keturunan Siam, dan memecah belah kerajaan Melayu Patani, agar gerakan perlawanan dapat diredam. Pada masa ini, gerakan pemberontakan telah mulai terbentuk (Paulus Rudolf Yuniarto, 2004). Situasi Patani semakin tidak berdaya ketika terjadi perjanjian antara pihak Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Siam dalam hal pembagian wilayah. Inggris menyerahkan wilayah Patani kepada Kerajaan Siam.

Masyarakat Muslim Patani kemudian harus dihadapkan pada konsekuensi kebijakan integrasi politik-administratif. Perubahan besar dirasakan oleh masyarakat Muslim Patani yang awalnya

adalah sebuah komunitas mayoritas, kini menjadi komunitas minoritas pada skala nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah konsolidasi administrasi yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah wilayah bangsa Melayu ke dalam sistem politik nasional Kerajaan Siam (Paulus Rudolf Yuniarto, 2005). Selain menerapkan kebijakan sentralisasi, pihak kerajaan juga menerapkan kebijakan *eta lak Thai*, yaitu satu bangsa Thailand, satu agama Budha, dan harus tunduk pada kekuasaan Raja (Wulandari, Susiatiningsih, & Rosyidin, 2018).

## **2. Dinamika kehidupan sosial masyarakat patani**

Sebelum menjadi bagian dari kerajaan Siam, wilayah Thailand Selatan seperti Narathiwat, Pattani, dan Yala merupakan bagian dari Kerajaan Melayu Patani, dan menjadi bagian dari Kerajaan Siam sejak 1902. Saat Thailand diperintah oleh Perdana Menteri Phibun Songgram (1938-1944) upaya integrasi wilayah nasional kerajaan diimplementasikan melalui sistem politik ultra-nasionalis. Penggabungan politik ini dilakukan melalui kebijakan

konsolidasi wilayah bangsa Melayu untuk kepentingan integrasi (Paulus Rudolf Yuniarto, 2005).

Pada masa pemerintahan Sarit Tanarat, tahun 1957, beberapa kebijakan diambil untuk menyesuaikan aturan mengenai sekolah Islam tradisional (pondok, atau di Thailand dikenal dengan istilah Bono) di Thailand bagian selatan. Pemerintah mencoba menata kembali sekolah-sekolah swasta, atau menrenovasi kurikulum yang sudah ada (Onozawa, 1987; Pitsuwan, 1982; Shinya, 2017). Suasana pro-demokrasi pada pertengahan 1970-an pasca terjadinya insiden 14 Oktober 1973, dimana gerakan anti-perintah yang diprakarsai mahasiswa mampu mengalahkan pemerintah yang dipimpin militer, mendorong gerakan politik Muslim Melayu di Selatan (Shinya, 2017).

Dibawah pemerintahan yang pro-demokrasi tahun 1990-an, beberapa perubahan kebijakan terkait Islam pun terjadi. Banyak dukungan terhadap Muslim di bagian selatan Thailand yang diberikan oleh Partai Demokrat sebagai salah satu partai penguasa. Gerakan pro-demokrasi merupakan faktor yang lebih menguntungkan Muslim Melayu. Adanya aturan memperluas

otonomi daerah, dan kebijakan yang mendorong budaya lokal pada konstitusi 1997, telah memberi angin segar dalam memelihara budaya Melayu di Thailand Selatan (Shinya, 2017).

Namun hal itu ternyata belum juga menyurutkan keinginan masyarakat Muslim Patani dan sekitarnya untuk membebaskan diri dari pemerintah Thailand dan mendirikan pemerintahan mandiri. Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut diberhentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Identitas lama yang masih berada dalam bayangan kejayaan Patani mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebabnya karena Patani dianggap dianggap sebagai minoritas dan daerah taklukan kerajaan Siam, untuk itu masyarakat Patani tetap berupaya mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat (Wulandari et al., 2018).

Pemberontakan besar terjadi pada tahun 2004, dimana kelompok pemberontak melakuakn penyerbuan ke markas Militer Thailand di Distrik Arion Narathiwat. Serangan ini menewaskan 4 parjurit Thailand, dan 400 pucuk senjata dan amunisinya hilang. Aksi kemudian dilanjutkan dengan menyerang 10 pos polisi di wilyaha Yala, Patani, dan Narathiwat, serta Songkhla. Kemudia para pemberontak bersembunyi di Masjid Krue-Se di Patani, masjid yang dianggap palng suci oleh Muslim Patani. Pemerintah Thailand kemudian membalas dengan menyerang Masjid dan menangkap anggota kelompok pemberontakan yang ada di dalamnya (Wulandari et al., 2018)

Pada Oktober 2004, 1500 demonstnan berkumpul di kantor polisi Tak Bai Narathiwat. Aksi demonstrasi yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan aksi protes mereka terhadap kebijakan darurat Militer yang diberlakukan oleh Pmerintah Thailand di Thailand bagian Selatan, dan juga menuntut pembebasan enam orang anggota mereka yang terlibat pemberontahkan Krue-Se. Namun aksi ini kemudian menjadi tidak terkendali, dan terjadi kericuhan antara demonstnan dan pihak

kepolisian dikarenakan demonstran memaksa menerobos brikade polisi, yang mengakibatkan terjadi saling dorong antara keduanya. Tembakan peringatan pun dilepaskan oleh tentara Thailand namun menggunakan peluru tajam, yang membuat jatuh korban sebanyak tujuh orang dari pihak demonstran. 1300 demonstran lainnya ditangkap dan diperlakukan tidak manusiawi dengan menumpuknya di dalam truk yang penuh sesak menuju *Inkayut Army Camp*, yang berakibat tewasnya 78 orang karena sesak nafas dan cedera serius (Nurakkate, 2012).



Gambar 3.4 Peta Thailand bagian Selatan  
(<http://asiapacific.anu.edu.au/maponline/base-maps/southern-thailand-1>)

### **3. Penaklukan daerah lanna oleh kerajaan siam**

Sejarah Thailand bagian utara dirangkum dari pergeseran kekuatan dari berbagai kekuasaan independen. Salah satu pengaruh budaya awal yang paling signifikan terlihat berasal dari kerajaan Haripunchai (yang kini dikenal dengan Lamphun), yang berkuasa pada kurun waktu antara akhir abad ke-8 hingga abad ke-13. Orang Thai, yang merupakan imigran dari China sejak sekitar abad ke-7, mendirikan Kerajaan Sukhotai dan menganeksasi Haripunchai dari kekuasaan Mon (Wheeler & Wheeler, 2018).

Lanna merupakan sebuah kerajaan yang berkuasa sejak abad ke 13, yang didirikan oleh Raja Mengrai di wilayah Chiang Rai pada 1262, setelah menaklukan kerajaan Mon, kemudian pada 1296 sang Raja memindahkan ibukotanya ke Chiang Mai. Lanna mengalami masa keemasan pada abad ke-15, ketika berhasil menguasai Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, dan Nan, dan kemudian mengalami perluasan dengan adanya kesepakatan antara kerajaan Lanna dengan kerajaan Burma dan mendapatkan sebagian wilayah bagian selatan Burma pada abad ke-16.

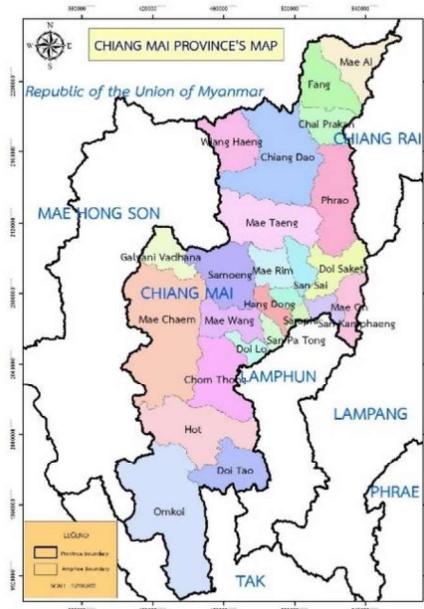
Pada abad ke-18 kekuasaan Lanna di bagian utara Thailand berahir disebabkan oleh banyaknya friksi internal dan juga invasi Inggris. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kerajaan Siam untuk menaneksasi wilayah kerajaan Lanna melalui perang selama 30 tahun dengan dibantu oleh Pangeran Kawila dari Lampang (Sampurna, 2014).

Sebelum abad ke-19, wilayah bagian utara Thailand merupakan wilayah dengan administrasi independent, walaupun masuk sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Siam. Pada tahun 1874, utusan Siam barulah hadir untuk mengurus negosiasi perdagangan sumber daya alam dengan Inggris. Pada saat itu, wilayah Lanna hanya dimanfaatkan secara ekonomi. Pengintegasian wilayah Lanna kepada Kerajaan Siam barulah dilakukan pada masa kepemimpinan Raja Chulalongkorn (Gungwu, 2005).

#### **4. Dinamika kehidupan sosial masyarakat chiang-mai**

Chiang Mai merupakan daerah yang multikultural, mayoritas orang di Chiag Mai termasuk Tai-Yuan yang menyebut diri mereka "Mueang" atau "Orang Lanna". Ada beberapa kelompok

etnis lainnya, termasuk orang Tai Lue Tai. Khin Thai Yai, orang orang Young Yong, semuanya memiliki budaya yang sama, namun beberapa memiliki bahasa etnis yang berbeda beda. Selain itu ada suku suku pegunungan yang telah bermigrasi di sepanjang tepi area. Ada sekelompok orang China, orang asing yang telah hidup bersama selama ratusan tahun.



Gambar 3.5 Peta Chiang Mai (<http://www.orangesmile.com>)

Muslim Yunnan merupakan salah satu kelompok etnis yang berasal dari China, dan biasa disebut sebagai etnis Hui, yang tinggal di Thailand bagian utara. Muslim Yunnan tinggal dan membentuk

komunitas Muslim secara bertahap di Thailand bagian utara, terutama Chiang Mai, sejak akhir abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20. Muslim Yunnan datang ke wilayah Thailand utara melalui migrasi dalam beberapa gelombang dan berlatar belakang motivasi yang berbeda-beda (Wang-Kanda, 2016) .

Gelombang yang pertama datang dalam rangka menjalin hubungan perdagangan antara China dan daerah Asia Tenggara pada akhir abad ke-19. Kafilah-kafilah Muslim Yunnan membuka jalan membawa barang-barang komersial hingga ke Burma, Laos, dan Thailand menggunakan kuda dan bagal. Dengan berakhirnya kolonialisasi Inggris dan Perancis di Burma dan Indocina, jalan-jalan yang digunakan oleh Muslim Yunnan ini menarik perhatian dikarenakan mereka menyediakan jalan pintas ke daratan China. Sebagian kafilah dagang Muslim Yunnan itu kemudian menetap di Thailand. Pada akhir abad ke-19, mereka telah membentuk sebuah komunitas embrio. Pada tahun 1917, orang-orang Muslim Yunnan yang ada di Thailand Utara mengambil peran sebagai pemimpin agama di Chiang Mai, dan sebuah mesjid, Ban Ho, dibangun. Inilah yang disebut sebagai gelombang pertama migrasi

Muslim Yunnan di Thailand Utara yang diawali dari sebuah hubungan perdagangan (Setthamalinee, 2010; Soonthor-pasuch, 2013; L. Wang, 2014).

Kekalahan kaum Hui dari Dili oleh Dinasti Qing di China pada tahun 1872 telah mengakibatkan gelombang migrasi Muslim dari Yunnan berikutnya. Mereka kemudian bermigrasi ke Burma, Thailand Utara, dan Taiwan. Pada saat Burma diduduki oleh Inggris dan kemudian Jepang, masyarakat komunitas muslim Yunnan yang ada di Burma kemudian terusir dan bermigrasi ke Thailand Utara (Wang-Kanda, 2016).

Gelombang migrasi ketiga terjadi saat paruh kedua abad ke-20. Migrasi ini terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan politik dalam negeri negara Republik Rakyat China pada 1949. Pada saat itu, Partai Komunis China memenangkan perang saudara dan kemudian mendirikan Republik Rakyat China. Hal ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran dari China ke Taiwan dan Asia Tenggara, termasuk Muslim Yunnan yang kemudian menetap di Thailand Utara. Desa-desa pengungsi kemudian terbentuk di sepanjang perbatasan Thailand Utara dan Burma.

Termasuk yang dibangun oleh Muslim Yunnan sebagai basis mata pencaharian (Wang-Kanda, 2016)

Sepanjang kebersamaannya dengan tentara KMT, Muslim Yunnan menghadapi kesulitan setelah menetap di Thailand. Wang (2016) melakukan wawancara pada tahun 1998 dan mendapati lebih dari 80.000 orang China Han dan 10.000 diantaranya merupakan Muslim Yunnan dari suku Hui, tinggal di Thailand utara. 90 desa pengungsi dibangun di sepanjang perbatasan utara Thailand. Terdapat desa-desa Muslim namun separuhnya dihuni campuran.

Masih menurut penelitian Wang (2016, 2011), pemerintah Thailand mencoba untuk mengendalikan Muslim Yunnan dengan menggunakan perspektif keamanan nasional dan mengesampingkan pandangan etno-religi. Pemerintah Thailand sangat berhati-hati dengan pengalaman selama Perang Dingin mengenai gerilyawan komunis di sepanjang perbatasan Utara Thailand. Hal ini kemudian mengakibatkan kebijakan represif dari pemerintah Thailand. Orang-orang Han dan Muslim Yunnan dikurung di desa-desa pengungsi di bawah kendali pemerintah

Thailand. Mobilitas mereka juga sangat dibatasi. Mereka dilarang berpergian secara bebas dan diijinkan secara kondisional ke luar wilayah administrasi tempat tinggal mereka hanya jika mereka mengajukan permintaan tertulis, disebabkan oleh status mereka yang dianggap sebagai imigran dan penduduk ilegal bagi pemerintah Thailand. Orang-orang Han dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi tentara KMT yang memerangi tentara komunis di perbatasan, yang membuat orang-orang Han mendapat sedikit kebebasan, sedangkan orang-orang Hui dari Yunnan tetap menjadi pengungsi. Muslim Hui sempat tidak mendapat pengakuan dan pengusiran oleh pemerintah Thailand dikarenakan kecurigaan dan kekhawatiran terhadap perdagangan opium.

Identitas Muslim Hui di Thailand sebagai Muslim Transnasional dimulai sejak 1991 hingga kini. Pengaruh berkembangnya media komunikasi, internet, dan situs web telah membantu Muslim Hui di Thailand untuk berhubung dengan China dan negara-negara Arab. Pada periode ini, Muslim Hui di China terbagi menjadi 3: pertama, garis keturunan Hanafi China.

Kedua, *Liver Lee-Yama Ah* dari keturunan India, dan ketiga adalah Salafi-Wahabi dari Arab Saudi .

Di Wilayah Chiang Mai, terdapat 13 Masjid yang resmi terdaftar di pemerintah hingga tahun 2003. Namun sebenarnya di Chiang Mai bukan hanya terdapat 13 masjid saja. Pemerintah sedikit membatasi pendirian Masjid dengan ketentuan pendaftaran Masjid ke pemerintah. Namun bukan hanya pemerintah yang membatasi, sebagian masyarakat, terutama yang di desa-desa, juga masih masih memiliki kekhawatiran pendirian Masjid akan mengganggu lingkungan terutama kehidupan sehari hari orang lokal. Pemerintah memberlakukan peraturan yang sedikit berbeda mengenai Masjid untuk daerah Selatan dan Utara. Di beberapa daerah di Selatan, Masjid diperbolehkan menggunakan penguat suara keluar, sedangkan Masjid di Utara dilarang menggunakan penguat suara ke luar.

Islam merupakan agama terbesar ketiga di Chiang Mai setelah Budha dan Nasrani, dengan prosentase 1,17%. Walaupun sangat kecil dalam hal jumlah, namun Muslim di Chiang Mai

cukup mewarnai kehidupan sosial di Chiang Mai, terutama pusat pusat kegiatan yang sangat dekat dengan Masjid.

Dalam sebuah grup percakapan bernama Pantip, tergambar sebuah kekhawatiran dari masyarakat lokal Thailand mengenai keberadaan Muslim. Kekhawatiran itu didapat setelah mendengar atau membaca berita lokal mengenai peristiwa peristiwa negatif yang berhubungan dengan Muslim di Thailand, terutama isu mengenai Islam di Selatan. Berita yang mereka dengar mengenai Islam Separatis di Selatan, mengenai Muslim Ughyur yang dianggap teroris, mengenai Islam di Myanmar yang dianggap teroris, dan berita berita semacamnya, termasuk berita berita di dalam negeri mengenai penembakan di Thung Yang Daeng, ataupun kematian Sersan Pian (politik)<sup>4</sup>.

Masyarakat Muslim Hui di Chiang Mai, seperti juga masyarakat minoritas lainnya di Thailand, mendapat hak yang sama dengan masyarakat asli mayoritas sebagai warga negara. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pelayanan

---

<sup>4</sup> <https://pantip.com/topic/33519671>

kesehatan dan pendidikan, juga dengan pelayanan publik lainnya, misalnya gratis menggunakan transportasi publik.

Tabel 3.1 Keberadaan Masjid di Chiang Mai (Sumber Ministry of Interior (Kementrian Dalam Negeri) Thailand

Nama Masjid	Tanggal pendaftaran	Lokasi (Distrik)
Hidayatul Islam Han Bo	20 Mei 1949	Mueang
Chang Khlan	20 Mei 1949	Chang Khlan
Islam Pak Thong	30 September 1949	Bukit Pasir ( Sand Dunes)
Rumah Islami	17 Februari 1953	Chang Khlan
At Taqwa	19 Oktober 1969	Wat Ket
Al Fajali	15 Juli 1971	Choeng Doi
Al-Imani	23 Agustus 1971	Fang
Allah	26 April 1974	Mae Ai
Assadada (Dam Hua)	November 1976	Mata Air Panas
Al Aiyan San	7 Maret 1977	Mae Ngon
Assam	21 September 1977	Pasir
Darul Bir	27 September 2002	San Kamphaeng
Darussalam	23 Januari 2003	Punggung Tengah
Nurul Chang Phuek-Kunnun		Mueang
Al Aqiah		Fang
Assumption Mosque		San Kamphaeng
Nurul Huda		Saraphi
Al Ansar		Mueang